

IMPLEMENTASI SAK EMKM PADA UMKM (STUDI KASUS PADA UMKM TEMPE NGRAYUN DI KABUPATEN PONOROGO)

Mohammad Rudi Ariyanto*, Maslichah**, M. Cholid Mawardi***

rudimohammad70@gmail.com

Universitas Islam Malang

ABSTRACT

Implementation of Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities carried out at Tempe Ngrayun SMEs in Ngrayun District, Ponorogo Regency using a case study approach with descriptive qualitative methods. Collecting data through interviews directly to the object of research. The implementation of Financial Accounting Standards SMEs in Tempe Ngrayun SMEs is assessed based on four assessment variables, namely accounting records (basic accrual basis and the concept of business entities), ownership of human resources, supporting facilities/infrastructure, and knowledge of Financial Accounting Standards SMEs. The results showed that most of the Tempe Ngrayun SMEs in Ngrayun District, Ponorogo Regency were considered not ready to implement Financial Accounting Standards SMEs. This is based on the interview data obtained showing that all Tempe Ngrayun SMEs have not met the four assessment variables. Almost all SMEs in Tempe Ngrayun can only fulfill one of the assessment variables. The results obtained in this study indicate that the unpreparedness of Tempe Ngrayun SMEs in implementing Financial Accounting Standards SMEs is influenced by the lack of knowledge of Tempe Ngrayun SMEs actors on Financial Accounting Standards SMEs.

Keywords: *Financial Accounting Standards SMEs, SMEs, Basic Accounting Assumptions, Human Resources, and Supporting Facilities.*

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sejatinya merupakan salah satu ujung tombak dalam mendukung perekonomian nasional. Menurut Laporan Kementerian Koperasi dan UKM (KUKM) Quartal 1 tahun 2021 menyatakan bahwa jumlah pelaku UMKM saat ini mencapai 64,2 juta dengan kontribusi yang diberikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai persentase 61,07% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Selain berkontribusi pada penyumbang perekonomian negara, sektor UMKM juga berkontribusi pada penyerapan tenaga kerja sebesar 97% dan kemampuan penghimpunan dana investasi sebesar 60,4%. Namun, jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami stagnasi dan cenderung menurun. Dibuktikan dengan data dari KUKM pada tahun 2019 terbilang bahwa jumlah pelaku UMKM sudah mencapai 65,5 juta. Hal ini tidak terlepas dari adanya pandemi Covid-19 yang turut menyerang sektor perekonomian Indonesia termasuk pada sektor UMKM (*ekon.go.id diakses 14 oktober 2021*).

Terlepas masalah yang ditimbulkan oleh adanya pandemi Covid-19, kontribusi UMKM masih sangat berkontribusi secara spesifik terhadap perekonomian Indonesia. Pemulihan terutama pada sektor ekonomi selama berlangsungnya pandemi Covid-19 pada Quartal 1 tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan upaya para pelaku maupun calon pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.

Permasalahan UMKM yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM, diantaranya terkait dengan modal yang digunakan, kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan

keuangan usaha, dan cara pemasaran produk yang masih terbilang sederhana atau tradisional. Permasalahan-permasalahan ini membuat kinerja perkembangan sektor UMKM dewasa ini terlihat stagnan. Permodalan dianggap sebagai faktor kunci untuk perkembangan dan kelangsungan suatu unit usaha UMKM. Menurut (Nisak, 2013) menyatakan bahwa dengan adanya modal yang tinggi, pengusaha/pelaku usaha akan mampu memproduksi hasil usahanya menjadi lebih banyak sehingga akan meningkatkan pendapatan dari unit usaha tersebut.

Menurut Siswanti dan Suryati (2020) menyatakan bahwa variabel kompetensi SDM dan skala usaha (perusahaan) mempengaruhi para pelaku usaha terutama UMKM dalam penyusunan laporan keuangan usahanya. Oleh karena itu, pengetahuan akuntansi UMKM masih sangat diperlukan oleh para pelaku usaha UMKM. Sistem pencatatan dan pengakuan baik dari segi pendapatan usaha, pertumbuhan laba, pengakuan aset serta pemisahan modal (modal usaha dengan uang pribadi) akan menjadi terorganisir. Sehingga akan memudahkan para pelaku usaha UMKM dalam penyusunan pembukuan sehingga dapat mengukur dan menilai kinerja serta mengambil keputusan dengan baik dan tepat untuk perkembangan usahanya.

Perkembangan UMKM saat ini di Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan, dimana jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo mengalami fluktuasi setiap tahunnya, data terakhir tahun 2020 menunjukkan jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo berjumlah 5.080 unit UMKM (dpmppts.ponorogo.go.id). Salah satu produk unggulan UMKM di Kecamatan Ngrayun adalah Tempe Ngrayun yang terbilang legendaris dan unik.

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi SAK EMKM pada UMKM Tempe Ngrayun di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Penilaian ini terkait dengan pemahaman dan pengetahuan SAK EMKM, pencatatan akuntansi, SDM, dan sarana pendukung yang memadai dalam upaya pelaku UMKM Tempe Ngrayun terkait pembuatan laporan keuangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka ditarik sebuah rumusan masalah 1) Apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo sudah mengetahui terkait adanya penerbitan SAK EMKM?; 2) Apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah menerapkan pencatatan akuntansi berbasis akrual sesuai SAK EMKM?; 3) Apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah menerapkan konsep entitas bisnis sesuai SAK EMKM?; 4) Apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah memiliki SDM yang memadai dalam upaya penerapan SAK EMKM?; 5) Apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah memiliki infrastruktur yang memadai dalam upaya penerapan SAK EMKM?

Tujuan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo sudah memiliki pengetahuan terkait adanya penerbitan SAK EMKM, Untuk mengetahui apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah menerapkan pencatatan akuntansi berbasis akrual sesuai SAK EMKM, Untuk mengetahui apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah menerapkan konsep entitas bisnis sesuai SAK EMKM, Untuk mengetahui apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah memiliki sumber daya manusia yang memadai dalam upaya penerapan SAK EMKM, Untuk mengetahui apakah UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah memiliki infrastruktur yang memadai dalam upaya penerapan SAK EMKM.

Manfaat Masalah

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi terkait judul penelitian yang serupa di masa depan.
 - b. Bagi akademisi dibidang akuntansi keuangan diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi terkait implementasi SAK EMKM pada UMKM yang sebagian besar masih belum menerapkan standar akuntansi tersebut.
 - c. Bagi bidang kewirausahaan diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan terkait SAK EMKM dan peran pentingnya SAK EMKM pada UMKM dalam melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai usaha pengembangan UMKM.
2. Praktis
 - a. Bagi UMKM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan bagi pelaku usaha UMKM terhadap perkembangan usahanya melalui peningkatan dan pengembangan terkait penggunaan standar keuangan akuntansi terkhusus Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam hal penyusunan laporan keuangan.
 - b. Bagi Diskopukm diharapkan dapat memberikan wawasan terkait bagaimana para pelaku UMKM dalam mengimplementasikan SAK EMKM dalam usahanya. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai rujukan untuk dapat menjadikan pelaku UMKM agar dapat mengimplementasikan SAK EMKM baik berupa sosialisasi atau pelatihan dasar.

II. TINJAUAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Berdasarkan Undang-Undang Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tertuang pada UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 1-3 menjelaskan definisi UMKM adalah usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, sedangkan usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, serta usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan dan cabang perusahaan yang dimiliki, serta tidak menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah

SAK EMKM yang diterbitkan oleh DSAK IAI merupakan penyederhanaan dari SAK ETAP karena mengatur standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dan mudah diterapkan pada transaksi umum pada sektor EMKM. Hal ini memudahkan pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan usahanya karena pengukuran dasar pengukuran yang digunakan adalah biaya historis yang cukup mencatat aset dan liabilitas senilai harga perolehannya (IAI, 2016).

Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan berdasarkan (IAI, 2016) SAK EMKM minimal terdiri dari, laporan posisi keuangan yang menyajikan informasi terkait aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan, laporan laba/rugi yang menyajikan informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan yang mengatur prinsip pada dasar informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya.

Kebijakan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Menurut (Yusuf & Nurhayati, 2017) mendefinisikan akrual basis adalah penerapan metode pengukuran akuntansi yang menjelaskan terkait setiap transaksi yang terjadi harus dicatat dalam laporan keuangan entitas saat transaksi disetujui/terjadi diantara kedua belah pihak, sedangkan menurut (IAI, 2016) konsep entitas bisnis harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan UMKM. Pemisahan keuangan pribadi dan pendapatan dari hasil usaha akan membantu dalam memastikan keuntungan usaha yang diperoleh oleh pelaku usaha, karena melalui pengeluaran dan pendapatan usaha dicatat dalam pembukuan usaha, sedangkan pengeluaran dan pendapatan pribadi diabaikan.

Sumber Daya Manusia

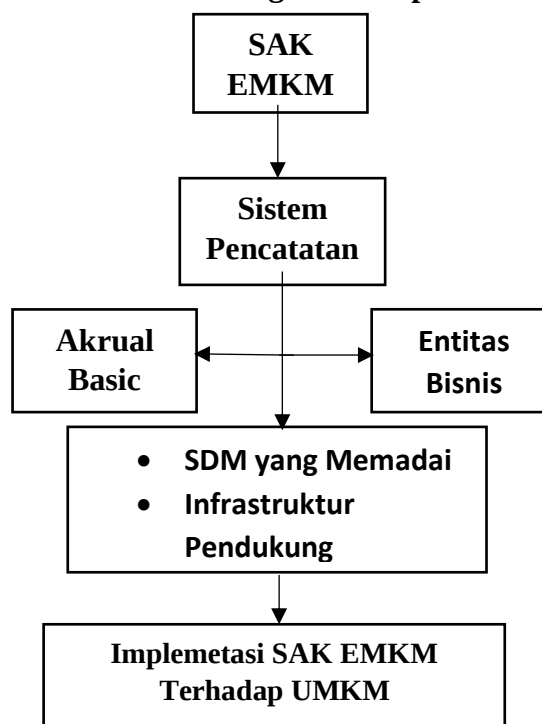
Menurut (Dewi, *et al*, 2019) mendefinisikan SDM diartikan sebagai semua kegiatan atau potensi atau apa-apa yang dimiliki manusia, seperti: akal budi, perasaan kasih sayang, keinginan untuk bebas merdeka, perasaan sosial, bakat berkomunikasi dengan pihak lain, memiliki cipta, rasa, karsa dan karya. Kepemilikan SDM yang memadai akan memudahkan perusahaan terkait dalam pembuatan laporan keuangan, disisi lain SDM juga dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kesiapan implementasi SAK EMKM.

Sarana dan Infrastruktur Pendukung

Menurut Mankiw (2003), menjelaskan infrastruktur merupakan sistem fisik dalam suatu kerangka sosial yang menyediakan berbagai kebutuhan sosial publik, yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. Sarana pendukung ini bisa berupa perangkat keras (*hardware*) yang dicontohkan seperti komputer dan peralatan pendukung lainnya dan perangkat lunak (*software*) yang dicontohkan berupa aplikasi maupun perangkat lunak lainnya dalam upaya kemudahan pembuatan laporan keuangan.

Kerangka Konseptual

Gambar 1 Kerangka Konseptual



Langkah-langkah dalam Mendeteksi Implementasi SAK EMKM oleh UMKM

Berdasarkan kerangka konseptual dibuat langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan survei lapangan terkait obyek penelitian.

2. Melakukan survei lapangan terkait implementasi pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.
3. Mengidentifikasi apakah UMKM dalam mengelola usahanya telah melakukan pencatatan keuangan sesuai asumsi dasar yang ditetapkan.
4. Mengidentifikasi apakah UMKM dalam mengelola usahanya telah memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usahanya.
5. Melakukan penggabungan semua data ataupun informasi untuk menyimpulkan apakah UMKM sudah siap mengimplementasikan SAK EMKM dalam usahanya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi lapangan dengan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Usaha Tempe di Kecamatan Ngrayun, Ponorogo, Jawa Timur dengan waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan Januari 2022.

Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah pelaku usaha tempe ngrayun yang ada di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Subyek penelitian didasarkan pada jumlah UMKM Tempe Ngrayun yang masih aktif memproduksi di wilayah Kecamatan Ngrayun.

Definisi Operasional Variabel

Variabel	Keterangan	Penilaian
- Pengetahuan tentang SAK EMKM	UMKM telah mengetahui SAK EMKM	UMKM siap mengimplementasikan SAK EMKM
	UMKM tidak mengetahui SAK EMKM	UMKM tidak siap mengimplementasikan SAK EMKM
- Dasar Pencatatan Keuangan yang digunakan	UMKM telah menerapkan akrual basis	UMKM siap mengimplementasikan SAK EMKM
	UMKM menerapkan <i>cash basis</i>	UMKM tidak siap mengimplementasikan SAK EMKM
- Konsep Entitas Bisnis (Pemisahan Harta Usaha dengan Harta Pribadi)	UMKM telah memisahkan harta usaha dengan pribadi	UMKM siap mengimplementasikan SAK EMKM
	UMKM tidak memisahkan harta usaha dengan pribadi	UMKM tidak siap mengimplementasikan SAK EMKM
- Kemampuan Sumber Daya Manusia	Pelaku UMKM memiliki pengetahuan atau sudah melakukan pencatatan keuangan usahanya	UMKM siap mengimplementasikan SAK EMKM
	Pelaku UMKM tidak memiliki pengetahuan dalam melakukan pencatatan keuangan	UMKM tidak siap mengimplementasikan SAK EMKM

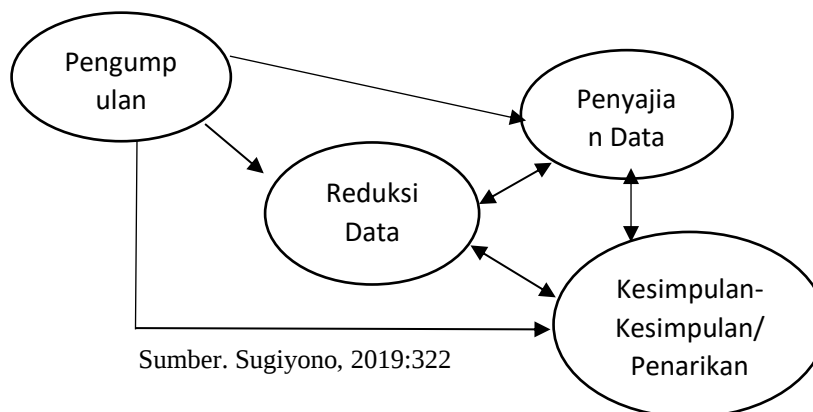
Variabel	Keterangan	Penilaian
- Sarana Pendukung	Pelaku UMKM memiliki sarana pendukung baik software maupun hardware	UMKM siap mengimplementasikan SAK EMKM
	Pelaku UMKM tidak memiliki sarana pendukung baik software maupun hardware	UMKM tidak siap mengimplementasikan SAK EMKM

Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo. Data sekunder didapatkan melalui dokumen penelitian atau sumber lain. Pengumpulan data penelitian dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode wawancara secara langsung kepada subjek penelitian yakni UMKM Tempe Ngrayun di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

Metode Analisis Data

Gambar 2 Metode Analisis Data



1. **Pengumpulan Data (Collection)**, dalam penelitian ini peneliti menggunakan pengumpulan data menggunakan wawancara secara langsung dan mendalam kepada pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo.
2. **Reduksi Data (Reduction)**, dalam penelitian “Implementasi SAK EMKM pada UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo” ini, peneliti dalam mereduksi data penelitian memfokuskan pada subjek penelitian yakni pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo dengan mengklasifikasikannya pada variabel pengetahuan UMKM terhadap laporan keuangan dan sistem akuntansinya, pemahaman terhadap SAK EMKM, ada atau tidaknya pemisahan harta pribadi dengan harta usaha, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dan infrastruktur pendukung yang dimiliki.
3. **Penyajian Data**, penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi yang telah diperoleh dan disusun yang akan memberikan gambaran penelitian yang menyeluruh terkait dengan masalah yang diteliti (Sugiyono 2019:325).
4. **Concluding Drawing/Verification**, proses penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dan disusun secara singkat dan mudah dipahami dengan tetap berfokus pada maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan yang dalam hal ini terkait dengan implementasi SAK EMKM pada UMKM Tempe Ngrayun di Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Subyek Penelitian

Kecamatan Ngrayun merupakan satu dari 21 kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Secara geografis letak Kecamatan Ngrayun berada pada ujung selatan Kabupaten Ponorogo. Terletak pada wilayah perbukitan, sebagian besar perekonomian masyarakat didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Salah satu produk asli dan unggulan masyarakat Kecamatan Ngrayun diantaranya adalah Tempe Ngrayun. Tempe Ngrayun merupakan produk olahan kedelai yang memiliki ciri khas tertentu yakni pembungkusan dengan daun temulawak, jati maupun daun pisang yang berbentuk persegi panjang serta tipis (pipih). Pemanfaatan daun temulawak yang tumbuh subur disekitaran wilayah Kecamatan Ngrayun menjadi ide dalam pembungkusan tempe tersebut.

Identifikasi UMKM Tempe Ngrayun

Tabel 1 Daftar Pelaku UMKM Tempe Ngrayun

Sumber: Data primer diolah 2021

No	Nama	Tahun Berdiri	Area Pemasaran	Jumlah Karyawan	Sumber Modal	Kendala
1	Gudik	2001	Ngrayun, Madura, Jakarta	1 orang	Sendiri	Modal
2	Endang	2012	Selor, Temon	Tidak Ada	Sendiri	Belum Ada
3	Katinah	2010	Balong, PKH	Tidak Ada	Sendiri	Belum Ada
4	Asep	2006	Pulung	2 Orang	Sendiri	Pemasaran
5	Agung	2006	Balong, Sawo, Kota Ponorogo	6 Orang	Sendiri	Manajemen Sumber Daya Manusia
6	Jamin	2005	Jetis, Sawo	1 Orang	Sendiri	Belum Ada
7	Tukiji	1999	Kota Ponorogo,	Tidak Ada	Sendiri	Belum Ada
8	Hadi	2010	Sendang	2 Orang	Sendiri	Belum Ada
9	Toni	2006	Balong, Sawo, Kota Ponorogo	4 Orang	Sendiri	Pemasaran dan SDM
10	Hari	2006	Ngrayun	Tidak Ada	Sendiri	Belum Ada
11	Udin	2005	Ngrayun	Tidak Ada	Sendiri	Modal, SDM dan Pemasaran
12	Risma	2010	Ngrayun, Balong	2 Orang	Sendiri	Belum Ada
13	Jaya	2000	Ngrayun, Bungkal	2 Orang	Sendiri	Belum Ada
14	Nanang	2010	Ngrayun	Tidak Ada	Sendiri	Belum Ada
15	Bambang	2009	Ngrayun, Bungkal, Balong	Tidak Ada	Sendiri	Belum Ada
16	Ikhrom	2006	Ngrayun	Tidak Ada	Sendiri	Belum Ada

Analisa Data dan Pembahasan

Sistem Pencatatan Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan menjelaskan bahwa sebagian besar para pelaku UMKM Tempe Ngrayun masih menerapkan metode *cash basic* pada pengakuan pembelian. Pak Toni salah satu UMKM Tempe Ngrayun di desa Temon

mengatakan bahwa ia selama menjalankan usahanya belum pernah melakukan pembelian baik barang atau alat produksi secara kredit namun lebih memilih untuk membeli secara tunai. Senada dengan Bu Endang, pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Desa Ngrayun yang mengatakan bahwa hal serupa seperti apa yang dikatakan oleh pak toni, dan lebih memilih untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu.

Temuan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indianty (2018) yang mengatakan bahwa sebagian besar para pelaku UMKM masih belum memahami metode pencatatan keuangan akuntansi sesuai SAK EMKM berup akrual basis dan melakukan pencatatan menggunakan metode *cash basic*. Sehubungan dengan itu penggunaan metode akuntansi yang sesuai dengan SAK EMKM yakni akrual basis akan memudahkan para pelaku UMKM Tempe Ngrayun dalam menilai keberlangsungan usaha dari periode-periode.

Konsep Entitas Bisnis

Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti, menjelaskan bahwa hampir semua para pelaku UMKM Tempe Ngrayun telah menerapkan pemisahan antara harta pribadi dengan harta usaha. Seperti yang dilakukan oleh Pak Gudik selaku UMKM Tempe Ngrayun di Desa Ngrayun mengatakan bahwa ia sejak mendirikan usaha pembuatan Tempe Ngrayun telah memisahkan harta pribadi dengan harta usahanya. Hal ini menurutnya untuk memudahkan dalam pengelolaan antara masing-masing harta baik milik pribadi ataupun usahanya.

Berbeda cerita dengan Bu Katinah pelaku usaha Tempe Ngrayun di Desa Ngrayun, yang mengatakan bahwa ia tidak memisahkan harta pribadi dengan harta usahanya, dengan anggapan bahwa baik harta pribadi maupun harta usaha sama-sama dijadikannya tumpuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari-hari. Berdasarkan temuan dari hasil wawancara tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rejeki (2020) yang mendapatkan hasil bahwa rata-rata UMKM tidak memisahkan harta/rekening milik pribadi dengan harta/rekening usaha.

Penerapan konsep entitas bisnis dengan melakukan pemisahan harta pribadi dengan harta usaha begitu penting dilakukan karena dapat memberikan batasan atas data transaksi dalam sistem akuntansi yang terjadi terhadap data yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Hal tersebut akan menunjukkan bahwa konsep entitas bisnis akan memberikan gambaran secara jelas akan keuntungan maupun kerugian yang didapat dari usaha yang dijalankan.

SDM yang Memadai

Hasil yang diperoleh dalam wawancara secara langsung oleh peneliti menjelaskan bahwa secara keseluruhan para pelaku UMKM Tempe Ngrayun telah mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan usahanya meski hanya sebatas pada laporan laba rugi sederhana. Seperti yang dilakukan oleh Pak Agung pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Desa Selur, mengatakan bahwa pembuatan pencatatan laporan usahanya berupa laporan laba rugi adalah untuk menilai laba/rugi yang didapatkan dalam setiap periode dan untuk kebutuhan pajak.

Berbeda halnya dengan Pak Tukiji, pelaku UMKM Tempe Ngrayun yang mengatakan karena ketidakmampuan dan ketidakpahaman mengenai pembuatan laporan keuangan usaha, ia lebih memilih sistem mengingat-ingat (perkiraan) setiap transaksi yang dilakukan dalam usahanya. Begitupun juga dengan Bu Endang, ia berpendapat bahwa ia tidak perlu melakukan pencatatan keuangan usahanya, dikarenakan pemisahan harta usaha dan harta pribadi telah disatukan dan hal tersebut membuatnya bingung. Oleh karena itu ia berpedoman pada perkiraan bagaimana caranya mendapatkan keuntungan dengan modal yang sedikit.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencatatan akuntansi secara sederhana telah dilakukan oleh para pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Kecamatan Ngrayun. Namun hasil tersebut tidak dapat memenuhi standar laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM berupa 3 bentuk laporan keuangan. Hasil tersebut senada pada hasil penelitian yang didapat oleh Khotijah (2019) yang menjelaskan bahwa pelaku UMKM dirasa belum siap dalam melakukan pencatatan transaksi keuangan, hal ini terjadi karena pemahaman yang sangat minim terkait bagaimana bentuk catatan transaksi keuangan seperti apa, maka hal tersebut memunculkan pemikiran bahwa pencatatan keuangan merupakan hal yang rumit dan sulit. Sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penyusunan laporan keuangan usahanya guna memberikan pengetahuan kepada para pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha para UMKM.

Infrastruktur Pendukung

Pelaku usaha UMKM Tempe Ngrayun yang tidak memiliki kepemilikan/ketersediaan infrastruktur pendukung guna untuk lebih memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi hingga pada pembuatan laporan keuangan. Pak Bambang pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Desa Selur mengatakan bahwa dikarenakan skala usaha yang masih kecil berupa *home industry* ia hanya membutuhkan buku kas saja dalam melakukan pencatatan transaksi usahanya. Begitupun dengan pak Gudik ia juga mengatakan bahwa sarana yang ia menggunakan dalam pencatatan transaksi usahanya hanya berupa buku kas, dan ia merasa sudah lebih dari cukup untuk melihat transaksi-transaksi yang terjadi.

Berbeda halnya dengan Bu Katinah dan Bu Endang yang menyebutkan karena ia tidak melakukan pencatatan dan bermodalkan perkiraan saja dalam operasional usahanya, ia tidak memiliki sarana pendukung apapun dalam mencatat transaksi-transaksi yang terjadi.

Temuan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Indianty (2018) yang menyatakan bahwa rata-rata UMKM belum memiliki sarana pendukung yang memadai guna mengimplementasikan SAK EMKM dalam skala usahanya. Sarana yang belum memadai baik berupa *hardware* ataupun *software* akuntansi menjadi kendala bagi UMKM Tempe Ngrayun untuk mengimplementasikan atau membuat laporan keuangan. Namun disisi lain kemampuan dan pengetahuan para pelaku UMKM Tempe Ngrayun terkait dengan teknologi membuat sebagian besar mereka lebih memilih mencatat menggunakan catatan tulisan tangan. Hal ini perlu disosialisasikan dalam bentuk pelatihan oleh pihak terkait dalam pemanfaatan sarana pendukung bagi UMKM untuk membuat laporan keuangan.

Pengetahuan Tentang SAK EMKM

Adanya penerbitan SAK EMKM oleh DSAK IAI tahun 2018 diharapkan mampu memudahkan para pelaku UMKM dalam mempersiapkan pengetahuan dan pemahaman terkait laporan keuangan yang baik dan benar. Namun pada kenyataannya, menurut survei dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Kecamatan Ngrayun tidak ada yang mengetahui terkait dengan SAK EMKM dan merasa sangat awam dan jarang terdengar oleh para pelaku UMKM Tempe Ngrayun apabila mendengar terkait dengan SAK EMKM. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dan pelatihan terkait dengan penerapan SAK EMKM pada UMKM Tempe Ngrayun di Kecamatan Ngrayun.

Berada pada daerah perbukitan membuat informasi terkait sosialisasi SAK EMKM menjadi sangat minim. Sebagian besar pelaku UMKM belum pernah mendengar ataupun bahkan menghadiri sebuah sosialisasi terkait dengan SAK EMKM. Perlu adanya sosialisasi dan pelatihan terhadap adanya SAK EMKM bagi UMKM terhadap pentingnya

pembuatan laporan keuangan usaha guna untuk memenuhi syarat permodalan dalam upaya pengembangan usaha UMKM.

Tabel 2
Tabulasi Hasil Data UMKM Tempe Ngrayun

Pencatatan Akuntansi		Konsep Entitas Bisnis		SDM yang Memadai		Sarana Pendukung		Pengetahuan SAK EMKM	
Basis Kas	16	Sudah Menerapkan	13	Sudah Melakukan Pencatatan	13	Terdapat Sarana Pendukung	0	Sudah Mengetahui	0
Basis Akrua	0	Belum Menerapkan	3	Belum Melakukan Pencatatan	3	Tidak Terdapat Sarana Pendukung	16	Belum mengetahui	16

Sumber: Data primer diolah 2021

V. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo sebagian besar masih mengadopsi/menggunakan dasar kas basis. Dalam hal ini tidak sesuai dengan asumsi dasar yang digunakan dalam SAK EMKM.
2. Sebagian besar UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah menerapkan konsep entitas bisnis yakni pemisahan harta usaha dengan harta pribadi. Maka dalam hal ini sesuai dengan dasar asumsi yang digunakan pada implementasi SAK EMKM.
3. SDM yang ada pada sebagian besar UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo telah melakukan pencatatan akuntansi walaupun dalam skala pencatatan akuntansi dasar berupa laporan laba/rugi sederhana.
4. UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo tidak memiliki infrastruktur pendukung guna memudahkan pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan akuntansi usahanya.
5. Pelaku UMKM Tempe Ngrayun di Kabupaten Ponorogo secara keseluruhan menyatakan tidak tahu mengenai standar akuntansi keuangan yang sesuai dengan skala usahanya yaitu SAK EMKM.

Keterbatasan

1. Peneliti memiliki keterbatasan pada jumlah sebenarnya UMKM Tempe Ngrayun yang masih aktif memproduksi.
2. Peneliti memiliki keterbatasan pada data terkait kesempatan untuk menggali informasi lebih terinci disebabkan sebagian besar kegiatan operasional usaha dalam bentuk pencatatan sederhana.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mampu menambah sektor-sektor UMKM lain yang tidak hanya berfokus pada UMKM Tempe Ngrayun.
2. Bagi para informan atau narasumber diharapkan mampu lebih terbuka dan tidak ikut-ikutan pelaku UMKM lain dalam memberikan keterangan guna menghasilkan kualitas penelitian yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Dewi, D. P. (n.d.). "Manajemen sumber daya manusia" (Issue 1).
- IAI. (2016). Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. *SAK EMKM Ikatan Akuntan Indonesia*, 4, 1–54.
- Indianty, Peggy. (2018). "Kesiapan Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM Tenun Ikat di Kota Kediri". Malang. Jimfeb
- Mankiw, Gregory N. 2003. Teori Makro Ekonomi Terjemahan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Nisak, K. (2013). Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Mojokerto. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(3), 1–13.
- Rejeki, SE., Ak., M.Si., CA., H. D. (2020). Kesiapan Para Pelaku UMKM Dalam Menyusun Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 7(3).
- Siswanti, T., & Suryati, I. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Study Kasus pada UMKM Kecamatan Makasar, Jakarta Timur). *INOBIIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 3(3), 434–447.
- Sugiyono. (2019). "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D". Bandung: PT Alfabet
- UMKM Menjadi Pilar Penting dalam Perekonomian Indonesia - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved October 14, 2021,
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM
- Yusuf, A. A., & Nurhayati, N. (2017). Analisis Penggunaan Metode Pencatatan Cash Basis dan Accrual Basis Pada Transaksi-transaksi di Bank Syariah. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 9(1).
- *) **Mohammad Rudi Ariyanto** adalah Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang
- **) **Maslichah** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang
- ***) **M.Cholid Mawardi** adalah Dosen tetap Universitas Islam Malang